

BAB I

PROFIL PERUSAHAAN

1.1 Sejarah PT PLN (Persero) ULP Selatpanjang

Berawal dari abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang diawal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pengawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pimpinan KMI pusat berinisiatif terhadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah departemen pekerjaan umum dan tenaga kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang Listrik, Gas dan Kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (Dua) perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik Negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah No 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga Listrikan (PKUK) dengan tugas yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih

dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

PT. PLN (Persero) ULP Selatpanjang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1980. Didaerah Selatpanjang sendiri terdapat 3 kantor PLN, yaitu bagian distribusi atau bagian jaringan, bagian mesin atau PLTD (pembangkit listrik tenaga disel) dan bagian Administrasi yang berlokasi di jalan Yos Sudarso Selatpanjang.

PT. PLN (Persero) ULP Selatpanjang saat ini bekerja sama dengan perusahaan PT. KBT, bentuk kerja sama dari PT. PLN (Persero) ULP Selatpanjang dengan PT. KBT adalah sewa mesin, artinya PT. PLN (Persero) ULP Selatpanjang menyewa mesin pembangkit yang disediakan dari PT. KBT. Lokasi mesin sewa PT.KBT berada di jalan gogok Selatpanjang.

1.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi PT. PLN (Persero) ULP Selatpanjang adalah sebagai berikut:

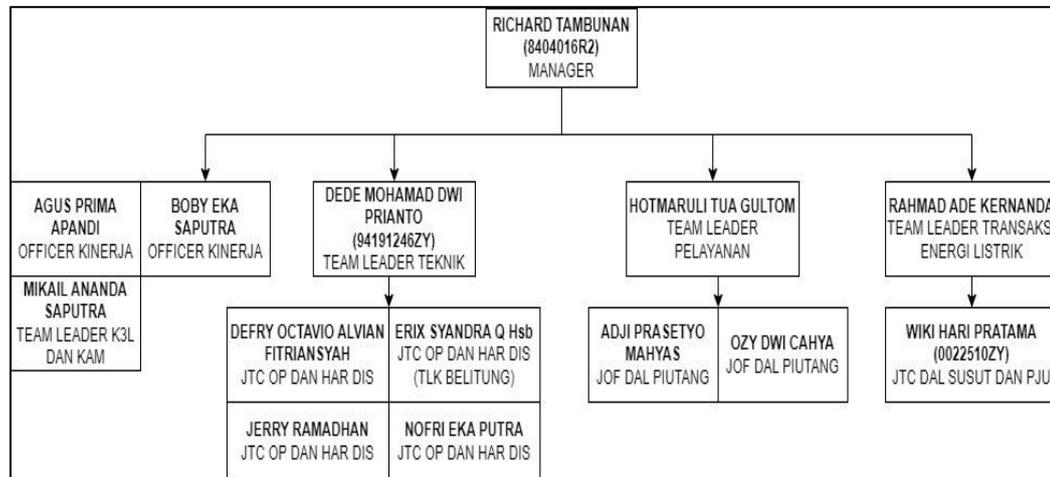
1.2.1 Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpecaya dengan bertumpu pada potensi insani.

1.2.2 Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

1.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Selatpanjang



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Selatpanjang

1.3.1 Manager

Tugas Pokok Dan Wewenang

1. Mengkoordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja untuk mencapai kinerja unit.
2. Mengkoordinat pelaksanaan pedoman keselamatan tenaga listrikan (K2) dan K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja.
3. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata usaha langganan (TUL)
5. Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan.
6. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
7. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
8. Melakukan pengendali komunikasi dan hubung kerja internal dan eksternal dengan stakeholder perusahaan.
9. Membuat keputusan teknis.

10. Menandatangani Surat Keluar, SPJBTL, SPK, Surat perjanjian kontrak sesuai kewenangannya.

1.3.2 Supervisor Teknik

Tugas Pokok Dan Wewenang

1. Meningkatkan keandalan sistem operasi jaringan distribusi.
2. Memelihara jaringan distribusi.
3. Mengendalikan pelayanan gangguan dan mengkoordinir petugas pelayanan teknis.
4. Memantau dan mengevaluasi susut distribusi upaya penurunannya.
5. Mengelola aset jaringan konstruksi distribusi.
6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan.
7. Memastikan penyusutan RAB dan SPK pekerjaan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Melaporkan pencapaian kinerja perusahaan Area dan Rayon.

1.3.3 Supervisor Transaksi Energi

Tugas Pokok Dan Wewenang

1. Melaksanakan pembinaan penerapan sistem pembangkitan, antara lain
 - a. Strategi pengoperasian dan pemeliharaan.
 - b. Standar operasi dan pemeliharaan serta standar penerapan dan pengujian peralatan.
 - c. Standar desain dan kriteria konstruksi.
 - d. Manajemen pengadaan dan perbekalan.
 - e. pengendalian efisiensi pembangkit dan gangguan serta usulan perbaikan.
 - f. Ketentuan data induk pembangkitan.
2. Menyusun rencana kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.

3. Menyusun kebijakan dan membina penerapan manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan.
4. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.
5. Menerapkan tata kelola ia perusahaan yang baik.
6. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.
7. Menetapkan kebijakan manajemen perbekalan.
8. Menandatangani surat perjanjian sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan baik eksternal dalam bidang pembangkitan.

1.3.4 Supervisor Pembangkit

Tugas Pokok Dan Wewenang

1. Menyusun rencana pengembangan sistem transaksi tenaga listrik untuk mendukung kebutuhan transaksi yang sesuai dengan *demand* (Pertumbuhan Beban).
2. Mengelola sistem dan proses transaksi tenaga listrik *Power Purchase Agreement* (PPA) *Power Sale Agreement* (PSA) dan *Transfer sale Agreement* (TSA) bersama para pihak untuk pedoman transaksi secara transparan dan akuntabel sesuai kontrak.
3. Melakukan supervise pemeriksaan dan pemeliharaan meter alat ukur peralatan uji kalibrasi dan peralatan khusus pada Transmisi dan Gardu Induk.
4. Mengavaluasi aturan-aturan transaksi dalam *Bidding Rules*, *Market Rules*, *Grinde Code*, dan aturan lainnya untuk mendukung penerapan proses transaksi berdasarkan regulasi dan aturan yang adil, transparan dan akuntabel.
5. Membuat laporan transaksi tenaga listrik dan neraca energi serta laporan sesuai bidangnya untuk mendukung laporan kinerja bidang *coporate*.
6. Mengolah data perusahaan untuk laporan AP2T dan bahan evaluasi/analisa untuk mendukung laporan kinerja unit.

7. Verifikasi hasil baca meter transaksi.

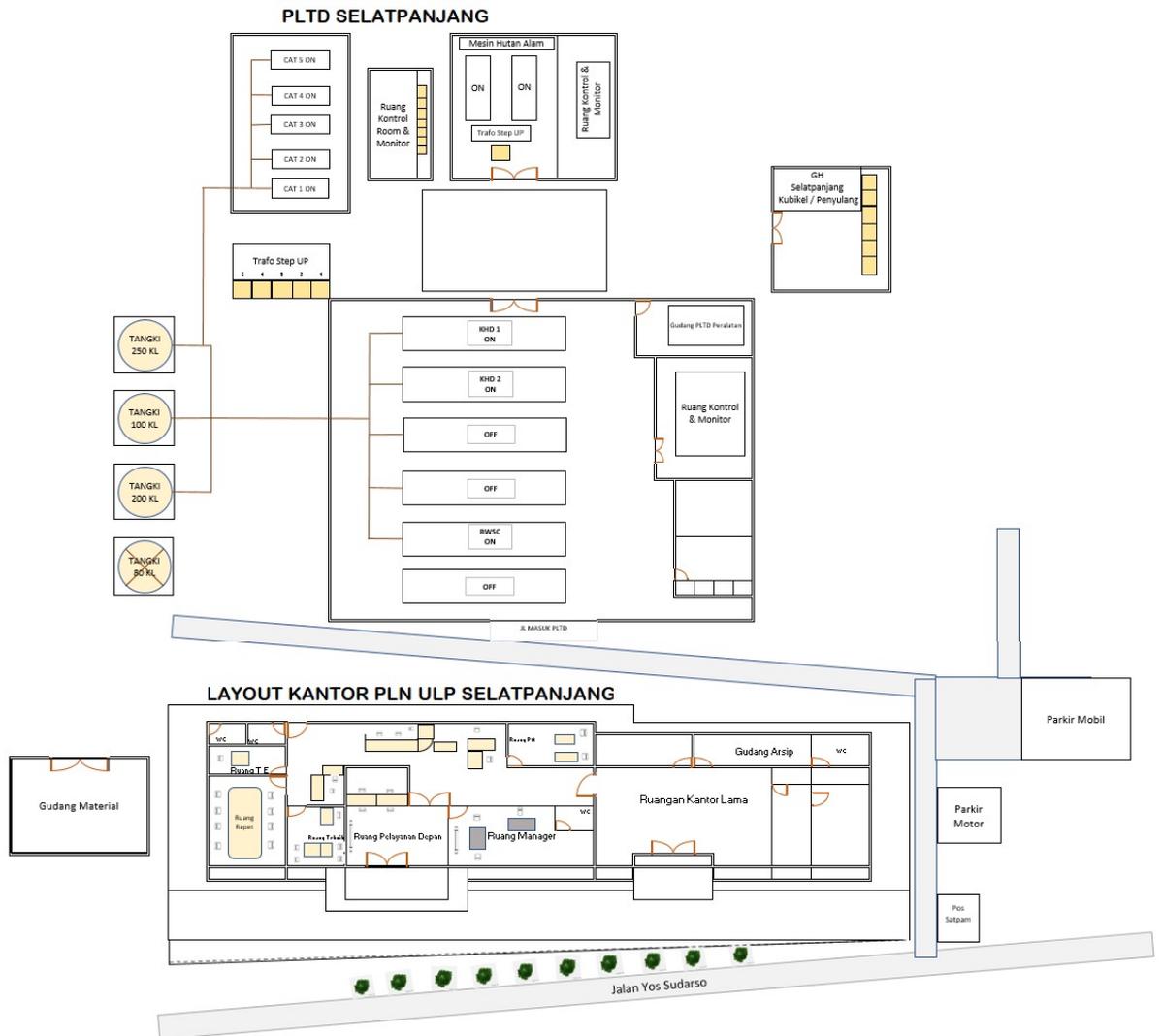
1.3.5 Supervisor Administrasi

Tugas Pokok Dan Wewenang

1. Melaksanakan fungsi tata usaha langganan.
2. Mengelola K3 di gedung Persero.
3. Mengatur administrasi perkantoran pemeliharaan gedung/kantor dan fasilitas kerja.
4. Mengelola fungsi keuangan di Persero.
5. Mengelola fungsi kehumasan.

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

Lay out menjadi suatu hal yang sangat penting untuk suatu perusahaan karena baik buruknya *lay out* akan menentukan efisiensi perusahaan, laba perusahaan serta ketangguhan perusahaan. *Lay out* merupakan susunan dari mesin-mesin dan peralatan disuatu perusahaan atau pembangkit listrik, yang mana *lay out* yang baik itu dapat diartikan sebagai penyusun yang teratur dan efisiensi dari semua fasilitas perusahaan dan kerja yang di bagian pembangkit listrik, penempatan peralatan kerja yang baik, pengerjaan minimal serta meminimalkan *kost*. Gambar 1.2 merupakan *Lay out* perusahaan yang ada di PT PLN (Persero) ULP Selatpanjang.



Gambar 1. 2 Lay Out PT PLN (Persero) Selatpanjang